

# **HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PADA DAERAH KHUSUS DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN**

**(Studi Kasus: Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 Tentang  
Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta)**

**SKRIPSI**

Oleh :

Keny Tirta Wijaksana

201610115208



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Pada Daerah Khusus Dalam Sistem Negara Kesatuan ( Studi Kasus: Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 Tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah DKI Jakarta)

Nama Mahasiswa : Keny Tirta Wijaksana

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115208

Bekasi, 29-07-2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hotma P Sibuea,S.H.,M.H.

Indra Lorenly Nainggolan,S.H.,M.H.

NID. 011904085

NID. 011606051

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Pada Daerah Khusus Dalam Sistem Negara Kesatuan (Studi Kasus: Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 Tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta).

Nama Mahasiswa : Keny Tirta Wijaksana

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115208

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2020

Bekasi,

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea,S.H.,M.H.

NID. 011904085

Pengaji I : Dr. Yurnal,S.H.,M.Hum.

NID. 011805008

Pengaji II : Dr. Dwi Seno Widjanarko,S.H.,M.H.

NID. 011703061

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

  
Jantarda Mauli Hutagalung,SH,S.Pd,MH

NIP. 1901378

  
Dr. Ika Dewi Sartika Saimima,SH,MH,MM

NIP. 2001450

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Keny Tirta Wijaksana  
NPM : 201610115208  
TTL : Jakarta, 23 Juli 1997  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Pada Daerah Khusus Dalam Sistem Negara Kesatuan ( Studi Kasus: Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 Tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta )*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 15 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Keny Tirta Wijaksana

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Keny Tirta Wijaksana  
NPM : 201610115208  
TTL : Jakarta, 23 Juli 1997  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Pada Daerah Khusus Dalam Sistem Negara Kesatuan ( Studi Kasus: Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 Tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ).**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hal bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 15 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Keny Tirta Wijaksana

## **ABSTRAK**

**Keny Tirta Wijaksana. 201610115208. Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Pada Daerah Khusus Dalam Sistem Negara Kesatuan.**

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) masalah penelitian. *Pertama*, Apakah kewenangan memberikan persetujuan yang dilakukan Menteri Sekertaris Negara dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta?. *Kedua*, Apakah substansi kewenangan memberikan persetujuan sudah tepat digunakan dalam keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran menyeluruh dengan melihat fakta yang berhubungan dengan permasalahan sehingga dapat membuktikan permasalahan agar dapat mendapat suatu jawaban yang ilmiah.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam kewenangan memberikan persetujuan oleh Menteri Sekertaris Negara kepada pemerintah DKI Jakarta berlawanan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tetang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dalam pengelolaan kawasan medan merdeka di wilayah DKI Jakarta. Karena pada dasarnya tanggung jawab pengelolaan kawasan khusus medan merdeka berada pada pemerintah pusat bukan pada pemerintah daerah DKI Jakarta. Kemudian, substansi dari kewenangan memberikan persetujuan tersebut dinilai kurang tepat, Karena kewenangan memberikan persetujuan cenderung pada sentralisasi yang memperlihatkan segala urusan pemerintahan harus sepengetahuan oleh pusat padahal hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta merupakan hubungan secara vertikal.

Kata Kunci: Negara Kesatuan, Otonomi daerah, Kewenangan.

## ABSTRACT

**Keny Tirta Wijaksana. 201610115208.** *The Central Government Authority With Local Governments On Special Areas In The System Of The Unitary State.*

*In this study there are 2 (two) research problems. First, Can the authority to give approval made by the Secretary of the State Secretary be considered contrary to Article 30 paragraph (1) of Law Number 29 Year 2007 concerning the Government of DKI Jakarta Province?. Second, is the substance of the authority to approve appropriately used in Presidential Decree Number 25 of 1995 concerning the Development of the Medan Merdeka Region in the Special Capital Region of Jakarta?.*

*The method used in this study is normative juridical. Normative juridical methods are used to find out and get a comprehensive picture by looking at facts related to the problem so that it can prove the problem in order to get a scientific answer.*

*The results of this study indicate that in the authority to give approval by the Minister of State Secretary to the DKI Jakarta government contrary to the provisions of Law Number 29 Year 2007 regarding the Provincial Government of DKI Jakarta related to the management of the independent terrain area in the DKI Jakarta area. Because basically the responsibility for the management of the special independent terrain lies with the central government not the regional government of DKI Jakarta. Then, the substance of the authority to approve is deemed inappropriate, because the authority to approve tends to be centralized which shows that all government affairs must be knowledgeable by the center even though the relationship between the central government and the provincial government of DKI Jakarta is a vertical relationship.*

*Keywords:* *Unitary State, Regional Autonomy, Authority.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, serta shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Topik yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah topik yang membahas masalah kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga penulisan ini menjadi tidak ada habisnya untuk diteliti dan menarik untuk selalu diperbincangkan karna bersinggungan dengan masalah hukum ketatanegaraan di Indonesia. Oleh sebab itu, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul **HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PADA DAERAH KHUSUS DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN (Studi Kasus: Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 Tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta)**. Walaupun hasil penelitian skripsi ini bukan karya yang sempurna, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Kemudian tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang telah berperan besar dalam memberikan bantuan dan solusi sampai penelitian skripsi ini selesai. Untuk itu penulis ingin memberikan rasa penghormatan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang selalu memberikan ilmu pengetahuan dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

2. Irjen. Pol (purn) Drs. Bambang Karsono, S.H.,M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Jantarda Mauli Hutagalung, S.pd.,S.H.,M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
5. Dr. Hotma P Sibuea, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing materi skripsi yang telah susah payah memberikan cukup banyak waktu dan tenaga serta motivasi yang tidak ada batasnya untuk penulis sehingga pikiran dan wawasan penulis menjadi lebih terbuka berkat ilmu yang telah disampaikan oleh beliau dengan caranya yang tegas dan serius demi melihat anak didiknya nanti dapat berguna di masa yang akan datang.
6. Indra Lorenly Nainggolan, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing teknis penulisan skripsi yang telah memberikan masukan dan koreksi kepada penulis selama penyusunan proses penyelesaian skripsi.
7. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bantuan pencerahan ilmu kepada penulis selama menempuh kuliah di kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Seluruh staf fakultas Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama menempuh kuliah di kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Keluarga besar untuk ayah saya Harry Prabowo dan ibu saya Sri Widayati, serta adik saya Jenio Prawirodinata yang selalu memberikan dukungan baik dalam doa maupun perhatian kasih sayang serta nasihat kepada penulis supaya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini selesai tepat waktu.

10. Semua teman-teman angkatan 2016 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan saran masukan yang dapat memberikan manfaat kepada penulis selama penyusunan skripsi.

Pihak-pihak yang penulis sebutkan secara terus menerus telah mendukung penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Hasil penelitian ini dipersembahkan untuk memberikan bahan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam bidang hukum tata negara. Namun, penulis menyadari sepenuhnya di dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini menjadi lebih bermanfaat.

*Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	7
1.3. Rumusan Masalah .....	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1. Tujuan Penelitian .....	8
1.4.2. Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Kerangka Teoritis	
1.5.1. Teori Negara Kesatuan .....	9
1.5.2. Teori Otonomi Daerah .....	10
1.5.3. Teori Kewenangan .....	11
1.6. Kerangka Konseptual .....	12
1.7. Kerangka Pemikiran ( <i>Framework</i> ) .....	14
1.8. Sistematika Penulisan .....	15

<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	17
2.1. Teori Negara Kesatuan .....	17
2.2. Teori Otonomi Daerah .....	24
2.2.1. Konsep Otonomi Daerah .....	26
2.2.2. Jenis-Jenis Aliran Otonomi .....	32
1. Otonomi Materiil .....	33
2. Otonomi Formal .....	33
3. Otonomi Rill .....	34
2.2.3. Daerah Otonom .....	34
2.2.4. Prinsip Otonomi Daerah .....	35
2.2.5. Asas Pelaksanaan Otonomi Daerah .....	38
1. Asas Desentralisasi .....	38
2. Asas Dekonsentrasi .....	42
3. Asas <i>Medbewind</i> (Tugas Pembantuan) .....	43
2.2.6. Otonomi Khusus .....	43
2.3. Teori Kewenangan .....	45
2.3.1. Sumber Kewenangan .....	48
2.3.2. Sifat Kewenangan .....	50
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	52
3.1. Jenis Penelitian .....	52
3.2. Pendekatan Penelitian .....	54
3.3. Sumber Bahan Hukum .....	55
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	56
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum .....	57
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	58
4.1. Kewenangan Memberikan Persetujuan Yang Dilakukan Oleh Menteri Sekertaris Negara Menurut Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 29	

Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta .....	58
4.2.Substansi Kewenangan Memberikan Persetujuan Dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 Tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah DKI Jakarta .....	78
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	98
5.2. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>107</b>

## **MOTTO**

*Barang siapa yang mencari ilmu dengan niat supaya pandai debat dengan ulama atau supaya dijagokan manusia atau supaya orang-orang menghadap padanya, maka Allah memasukkannya kedalam neraka*

*Ilmu itu hidupnya Islam dan tiangnya iman, barang siapa yang mengajarkan ilmu maka Allah menyempurnakan pahala baginya, dan barang siapa yang belajar ilmu kemudian mengamalkan ilmunya maka Allah mengajarkan padanya ilmu yang belum diketahuinya*

*Tiada kehidupan selain adanya kepentingan dan tidak ada kepentingan yang abadi kecuali untuk mengharap Ridho Allah Illahi Robbi*

## **PERSEMPAHAN**

*Kedua orang tuaku yang tercinta untuk ayah Harry Prabowo dan ibu Sri Widayati, yang telah memberikan kasih sayang, semangat serta doa kepada anaknya untuk menentukan keyakinan jalan masa depan kelak*

*Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*